



INTEGRALISASI PENDIDIKAN NILAI-NILAI AGAMA KE DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASSIV

Soraya Oktarina, M.I.P

IAIN Bukittinggi

Email: sorayaoktarin4@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan politik, upaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang politik, mendorong ketertarikan individu untuk terjun kedalam aktivitas politik. Dewasa ini, politik kadung dikenal dengan diksi kotor, curang, buruk, dan tidak ramah. Diperlukan suatu pembaharuan iklim dan citra politik yang menyejukan. Agama merupakan landasan dan pijakan individu dalam bersikap. Memasukan nilai nilai ajaran agama islam dalam kegiatan Pendidikan politik, akan menghasilkan suatu budaya politik yang humanistic. Pendidikan politik ditujukan untuk menanamkan pentingnya demokrasi, keterbukaan dan empati, keadilan, persatuan dan sikap saling menghargai. Sementara islam dan Al-quran, adalah pedoman lengkap yang secara subtansial mengatur kehidupan manusia berdasarkan keadilan. Penanaman Nilai agama dalam proses Pendidikan politik menjadi harapan baru guna melahirkan suasana politik damai, bermartabat dan beradab.

Kata Kunci: Islam, Pendidikan, politik

ABSTRACK

Political education, an effort to increase public understanding and knowledge about politics, encourages individual interest to engage in political activities. Today, politics is known for its dirty, fraudulent, bad, and unfriendly diction. A climate reform and a cool political image are needed. Religion is the foundation and footing of individuals in attitude. Incorporating the values of Islamic religious teachings in political education activities will produce a humanistic political culture. Political education is aimed at instilling the importance of democracy, openness and empathy, justice, unity and mutual respect. Meanwhile, Islam and the Qur'an are complete guidelines that substantially regulate human life based on justice. The inculcation of religious values in the process of political education is a new hope in order to create a peaceful, dignified and civilized political atmosphere.

Keyword: politic, islam, education



PENDAHULUAN

Negara Indonesia akan kembali melaksanakan pesta demokrasi dalam wujud Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah [(Pilkada) Serentak pada Tahun 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo di dalam halaman youtube milik sekretariat kabinet RI mengingatkan untuk mulai melakukan edukasi massif terhadap masyarakat. Edukasi berupa Pendidikan politik yang mendalam, terstruktur, relevan, substansial dan bisa dipertanggung-jawabkan. Hal ini bermuara pada kekhawatiran mulai merebaknya isu- isu politik yang mengedepankan SARA, kebencian, kecurangan dan dapat mengancam stabilitas dan integrasi bangsa.

Masalah politik dan manusia adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Manusia memiliki kodrat sebagai makhluk yang ramah dan selalu berinteraksi (zoon politicon). Orang-orang dalam hidup mereka membutuhkan orang lain dan bergaul untuk mengatasi masalah mereka. Manusia sebagai zoon politicon memiliki potensi untuk menciptakan kehidupan sosial, menjunjung tinggi sikap bertoleransi dan menjadi landasan dalam membentuk kehidupan bersama yang damai dan tentram.. Aristoteles mengatakan bahwa salah satu upaya untuk memperkuat kapasitas individu dan mencapai jenis aktivitas publik yang tinggi sesuai potensi manusia yang esensial adalah melalui hubungan politik dengan

orang lain. Interaksi politik berkualitas bisa dilakukan jika manusia tersebut memahami dan mengerti akan politik. Apalagi pemahaman politik dapat dicapai dengan melakukan pendidikan politik. pendidikan adalah suatu usaha yang disadari dan disusun untuk memahami cara yang paling umum untuk menciptakan potensi diri agar memiliki kekuatan budi pekerti, ketenangan, wawasan, harga diri, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh individu, masyarakat dan negara. pendidikan adalah suatu tahapan sosial yang memiliki pengaruh dan dipengaruhi oleh dinamisasi masyarakat hingga pada akhirnya menjadi wujud budaya tertentu dalam masyarakat.

Negara Indonesia, suatu negara kebangsaan berlandaskan demokrasi yang sangat menjunjung tinggi adanya keseimbangan dan kesetaraan hak dan kewajiban. Masyarakat negara demokrasi memiliki pengakuan terhadap nilai dan martabat diri selaku individu. Negara demokrasi mengakui adanya berbagai macam hak seperti hak kemerdekaan berpendapat, hak berkelompok, hak kemerdekaan pres,dan hak beragama, begitupun Negara Indonesia.

Namun permasalahannya, tak jarang masyarakat didalam suatu negara tidak begitu mengetahui dan memahami tentang persoalan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat hidup berdasarkan kebutuhan dan kepentingan individu dan kelompok. Masyarakat kerap acuh



terhadap penyelenggaraan negara terkhusus persoalan politik.

Isu politik menjadi topik yang saat ini paling mudah dipelintir. Isu politik bahkan menjadi pembicaraan paling menarik, yang kemunculannya dapat hanya bersumber dari dugaan tanpa pembuktian. Namun apa sesungguhnya politik tersebut?. David Easton menjelaskan bahwa Politik sejatinya adalah suatu cara dalam meraih kekuasaan dan kewenangan. Politik juga dikaitkan tentang segala hal yang berhubungan dengan negara, lembaga negara, tujuan negara, serta hubungan negara dengan negaranya. Politik seperangkat hal yang saling terkait didalam sistem negara meliputi, kekuasaan, kewenangan, kebijakan, kehidupan publik, alokasi kewenangan, konflik dan juga masyarakat. Masyarakat Indonesia pada umumnya masih merasa apriori jika membicarakan politik. Membahas tentang politik, stigma yang beredar bahwa politik itu kejam. Masyarakat selalu berpikir bahwa politik itu adalah tentang sesuatu yang kotor, jahat dan menakutkan. Pemikiran ini cenderung membuat masyarakat tak berani menyentuhnya, apalagi terlibat dan berpartisipasi di dalam politik. Data partisipasi politik masyarakat Indonesia pada 6 pemilihan terakhir belum mencapai hasil maksimal. Partisipasi politik pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 sebesar 69,9 persen, pada tahun 2019 naik sebesar 81,9 persen. Untuk pemilihan legislative sebesar 81, 69 persen.

Sementara untuk partisipasi pada pemilihan kepala daerah tingkat partisipasi cenderung stagnan, pada tahun 2015 sebesar 70 persen, 2017 sebesar 74 persen, 2018 sebesar 73,2 persen dan tahun 2020 sebesar 76, 9 persen.

Realita perpolitikan Indonesia kian hari kian diramaikan dengan konflik pertentangan, perebutan kekuasaan, kecurangan dan hoax. Belum lagi kekecewaan masyarakat akan realitas perpolitikan korup. Banyaknya aktor-aktor politik yang dipercaya terlibat dan tertangkap melakukan perilaku Korupsi. Kurangnya minat masyarakat terhadap politik, membuat para penafsu kekuasaan harus berpikir keras dan menggunakan cara singkat dalam meraup suara. Para calon penguasa haruslah para pemilik modal besar untuk memperoleh dukungan masyarakat. Politik uang pun muncul menjadi ciri realitas politik Indonesia. Kondisi ini kian diperparah dengan ragam isu politik identitas dan *hate speech* yang kian berkembang dan memanas disetiap menjelang pemilihan. Fenomena pemilu terakhir, banyaknya bermunculan serangan isu-isu SARA, berita palsu, politik identitas, ujaran kebencian, serta dagelan politik antar kubu terkait. Berbagai macam isu terus digiring dan disebar secara massif melalui kampanye media sosial dan ulah *buzzer* yang saling serang satu sama lainnya. Kondisi ini kian memperburuk aura dan polarisasi politik masyarakat sehingga



mendorong tingkat apatisme dalam berpolitik.

Untuk menangkal semakin tidak acuhnya masyarakat terhadap politik, maka diperlukan suatu pemahaman akan politik yang mendalam dan berkesinambungan. Pendidikan politik menjadi penting dalam membentuk karakter politik suatu bangsa. Melalui Pendidikan politik, masyarakat dibina dan dikembangkan pengetahuannya sehingga mampu berpartisipasi dalam merubah iklim perpolitikan yang buruk. masyarakat merupakan sumber daya insani potensial yang perlu dikembangkan dan diakutualkan, Masyarakat perlu dibimbing dan diarahkan supaya memiliki keinginan untuk turut serta dalam aktivitas politik dan menciptakan perubahan. Pendidikan politik yang baik adalah Pendidikan politik yang memasukan unsur moral dan akhlak didalamnya. Pendidikan politik tidak hanya mengajarkan bagaimana cara dan proses manusia dalam berpolitik atau bernegara, namun juga memuat nilai-nilai kebenaran dan kepastian dalam berperilaku. Pendidikan politik yang baik adalah bagaimana menghasilkan karakter aktor dan iklim politik yang lebih humanis. Pendidikan politik yang humanis dapat tercipta dengan meintegrasikan nilai-nilai keagamaan kedalam proses Pendidikan politik.

Pendidikan politik dan integralisasi nilai Islam dicirikan sebagai teknik dan pendekatan yang mengarah pada pembentukan manusia untuk

memiliki karakter seorang muslim yang baik berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyelesaikan persoalan, tahapan dan aktivitas politik. Untuk mengusung nilai politik yang harmoni dan humanisme, Islam sebagai agama diterima dan diyakini memiliki nilai berkualitas tinggi dan universal serta serlaras dengan perkembangan kualitas kemanusiaan, kedamaian dan harmoni kehidupan publik. Islam dipandang sebagai sebuah agama yang mempunyai cara pandang yang utuh dalam memotret kehidupan sosial politik masyarakat. Islam sebagai agama mengandung persyaratan toleransi, keseimbangan, kesetaraan, kesederajatan, kesamaan antara berbagai komponen dalam proses berdemokrasi. Melalui pendidikan berbasis ajaran-ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, dinilai mampu mejadi agen perubahan social (*agent social of change*) dalam perbaikan sistem berpolitik dan bernegara.

PENDIDIKAN POLITIK

Manusia memiliki dua peran di dalam dirinya. Manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk social. Sebagai makhluk individu menyangkut tentang bagaimana hubungan manusia sebagai makhluk tuhan dan penciptanya, serta bagaimana hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial adalah tentang bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan disekelilingnya, baik dengan individu lain, kelompok,



organisasi ataupun lingkungan. Manusia terlahir membawa lima hal yang menjadi cirinya, yakni harkat, martabat, kodrat, hak dan kewajiban. Dalam menjalani kelima hal ini manusia dilengkapi dan dipengaruhi oleh lima hal penting, seperti akal/pikiran, perasaan/emosi, perilaku, kemauan dan fantasi.

Kelima elemen penting yang melengkapi manusia ini menjadikan manusia memiliki potensi-potensi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraannya. Manusia memiliki akal, cipta, karya dan karsa yang dapat membentuk suatu peradaban dunia. Manusia memiliki potensi besar dalam memperbaiki, mempengaruhi dan membentuk suatu system, termasuk itu politik. Dengan adanya kesadaran akan eksistensi dunia dan mengembangkan potensi kemampuannya, manusia dapat menggunakan kebijakan dan perencanaan dalam jalan melakukan interaksi politik. Setiap Individu di dalam aktivitas sehari-hari tidak pernah lepas dari politik. Manusia ketika menjadi makhluk politik harus mengerti posisi dan fungsinya, agar tidak salah salah berperilaku ketika menjadi subjek dan agar tidak disalahgunakan ketika menjadi objek hanya karena ketidaktahuannya tentang politik.

Mengerti tentang hakikat, fungsi dan tujuan manusia berpolitik maka diperlukan sebuah proses pembelajaran dan penanaman nilai-nilai politik di dalam diri manusia. Pendidikan politik menjadi pintu pertama

dalam pengenalan tentang apa itu politik. Pendidikan politik sendiri terdiri dari gabungan dua kata Pendidikan dan politik. Pendidikan dan Politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik disetiap negara, keduanya saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan memiliki pengaruh penting dalam membentuk suatu perilaku politik masyarakat.

Pendidikan jika ditinjau dari pengertian secara etimologis, berasal dari bahasa latin yakni educare dengan arti latih atau melatih. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional menggambarkan bahwa pendidikan adalah suatu pekerjaan yang disadari dan disusun untuk menciptakan suasana belajar dan pengalaman sehingga siswa secara efektif mengembangkan kemampuannya untuk memiliki potensi kekuatan, pengendalian diri, budi pekerti, wawasan, serta keahlian yang dibutuhkan untuk dirinya sendiri maupun oleh masyarakat dan negaranya. Al Muchtar di dalam tulisannya tentang Pendidikan dan Masalah Social Budaya mengatakan bahwa pendidikan adalah kesempatan untuk menciptakan kondisi perkembangan kualitas manusia dalam menguasai teknologi, ilmu pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya dalam rangka meningkatkan hasil potensi manusia. Azumardi Azra mencirikan pendidikan sebagai suatu kursus yang secara



mendasar mengubah cara pandang, membimbing dan mempersiapkan proses pelatihan yang dapat melahirkan manusia, kelompok, dan masyarakat yang memiliki etika, berakhlak dan dapat mengembangkan ide-ide kemanusiaan yang hebat di antara individu-individu

(Azzumardi:2000:3). Sementara itu Freire menyiratkan bahwasanya pendidikan dapat menjadi sebuah *pilot project* dan sarana untuk melaksanakan perubahan sosial guna melahirkan suatu masyarakat baru.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik tiga hal penting dari pendidikan. Pertama, pendidikan dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan masyarakat dan menjadi solusi atas permasalahannya. Kedua, pendidikan juga diyakini sebagai upaya membudidayakan dan mengembangkan kapasitas dan potensi yang dimiliki setiap individu secara maksimal, dan terakhir pendidikan adalah hal yang menyangkut tentang hubungan seorang individu dengan masyarakatnya, karena pendidikan melatih dan mengarahkan individu dapat lebih berguna sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara. Pendidikan secara umum perihal persoalan membentuk manusia ideal dan pembahasannya, dan pendidikan secara khusus yakni tentang aspek pedagogis yakni keefektifan cara dalam mengajar dan belajar demi mengembangkan potensi diri.

Politik secara etimologi berasal dari bahasa latin. *Polis* yang berarti kota, adapula *politieis* yang berarti warga negara. Kemudian kata *polis* dan *politieis* berkembang menjadi *politeia* yang artinya semua hal yang berhubungan dengan negara. Politik secara arti umum adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan negara dalam mencapai tujuannya. Politik menyangkut tentang pemerintahan publik yang didalamnya terdapat alokasi nilai oleh pihak yang berwenang. Menurut Aristoteles, politik dibutuhkan dalam kehidupan sosial manusia untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, yang melingkupi keinginannya dalam mencapai posisi tertentu di masyarakat, maupun dalam mempengaruhi masyarakat agar mau menerima ide dan gagasannya. Roger F Soltau mendefinisikan bahwa Politik itu adalah seputar mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; bagaimana hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain. Sementara Harold D. Laswell dan A. Kaplan melalui bukunya yang berjudul *Power Society* menyatakan bahwa Politik adalah tentang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan". Kemudian tulisannya ini kembali dikembangkan dan diperjelas dalam buku yang berjudul *Who gets What, When and How* yang menyuratkan bawasanya politik itu adalah



tentang siapa, apa yang didapat, kapan, dan bagaimana itu terjadi.

Politik mencakup tiga aspek penting, yakni kekuasaan, kedaulatan dalam negara, dan negara yang berdaulat. Konsep kekuasaan di dalam politik adalah mengenai kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain atau kelompok sehingga orang tersebut mampu berperilaku sesuai yang diinginkan pemilik kekuasaan. Kekuasaan juga menentukan siapa yang berhak dan pantas mengambil keputusan (decision making). Max Webber dalam teorinya menyatakan bahwasanya kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dan sekaligus menerapkannya dalam bentuk tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Adapun seseorang bisa memperoleh kekuasaan dengan lima cara, yakni legitimate power, coersive power, expert power, reward power, dan reverent power. Kekuasaan politik bisa ada hanya di dalam suatu negara yang berdaulat dan ada kedaulatan didalam negara tersebut.

Menggabungkan dua kata politik dan Pendidikan, maka pendidikan politik adalah suatu usaha pengembangan potensi manusia melalui penanaman dan pengajaran nilai politik sehingga dalam menimbulkan peran dan membantu perealisasi tujuan sistem politik. Namun cakupan dan makna pendidikan politik pada dasarnya jauh lebih luas dari

sekedar penggabungan dua kata tersebut. Soeharto mengatakan pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif.

Tingkat pendidikan politik masyarakat disuatu negara sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan berpolitik dan kondisi perpolitikan suatu negara. Di negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Di masyarakat maju, pendidikan merupakan komoditi politik yang sangat penting. Pendidikan politik suatu konsep yang ditujukan untuk membina potensi dan kemampuan individu sebagai suatu pribadi yang merdeka dalam mengembangkan dirinya sebagai seorang warga negara. Pendidikan politik adalah sebagai suatu *public knowledge* yang berusaha melibatkan warga negara ke dalam suatu komunitas dan aktivitas politik yang melahirkan partisipasi.

Munculnya realita dan kisruh politik dewasa ini menjadi perhatian serius yang dikaji ulang. Konflik yang timbul di dalam masyarakat dikarenakan berbagai macam perbedaan pandangan dalam berpolitik harusnya menjadi dasar pemberian pendidikan politik yang lebih *massiv* dan terstruktur bagi masyarakat Indonesia. perbedaan kepentingan dan pertarungan konflik dalam medan politik akan berpengaruh terhadap



pengambilan kebijakan. Oleh karena itu diperlukan aktor-aktor dan partisipasi dari masyarakat yang paham akan politik. Sehingga proses politik dapat dilakukan dengan sehat, sesuai kaidah dan dan sesuai dengan konsep dan unsur sistem politik yang semestinya.

INTEGRALISASI NILAI NILAI AGAMA DALAM PENDIDIKAN POLITIK

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama mengandung pengertian pelajaran atau kerangka yang mengarahkan keyakinan dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa serta aturan-aturan yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia serta keadaannya saat ini. Agama dikenal dengan istilah Din. Din adalah peraturan yang harus dipatuhi. Setiap agama mengandung pelajaran dan aturan tentang menjadi baik. Secara terminologi, agama merupakan kerangka keyakinan kepada Tuhan yang dianut oleh suatu perkumpulan umat dengan terus menerus berinteraksi dan bekerjasama dengan-Nya. Agama menjadi landasan individu dalam berperilaku dan bertindak dalam kehidupan. Agama menjadi acuan nalar dalam menjalankan eksistensi kehidupan setiap manusia. Setiap agama pada dasarnya hadir untuk mengemban misi menggarap eksistensi perbaikan kehidupan umat manusia melalui perubahan struktur masyarakat

Islam merupakan rahmat bagi kehidupan setiap manusia. Islam hadir sebagai agama universal yang melindungi dan mengatur seluruh hajat hidup manusia. Islam berkonsep dan medasarkan ajarannya kepada Al-quran dan hadist. Islam sebagai agama menyaratkan kebutuhan adanya sikap toleransi, kesederajatan, kesamaan, keadilan dan saling menghargai antar komponen yang beragam dalam proses berdemokrasi. Islam dan politik pada dasarnya merupakan dua hal yang terintegralistik. Hingga saat ini, terdapat tiga pemikiran dalam mengkaji tentang islam dan politik. Golongan pertama, menyadari bahwa islam dan politik tidak dapat dipisahkan. Islam dan politik memiliki hubungan yang sejajar dan saling melengkapi. Ajaran-ajaran dan nilai yang diajarkan di dalam islam mendukung dan menciptakan demokrasi. Golongan kedua, menganggap bahwa islam dan politik bersifat netral, keduanya berjalan sendiri-sendiri. Sementara golongan ketiga menyebutkan, bahwa tidak islam dan politik tidak bisa disatukan bahkan cenderung berlawanan.

Pendidikan menggunakan dasar agama memiliki fungsi membentuk karakter individu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan. Ajaran agama membantu mewujudkan karakter dan kemampuan inividu dalam memahami, menghayati, dan



mengamalkan perilaku berakhlak dan beradab dan menyerasikannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan kehidupan social. Integralisasi nilai-nilai islam didalam proses Pendidikan politik bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokratisasi, perilaku politik yang santun, serta meningkatkan penanaman kesadaran kepada masyarakat akan adanya keragaman (*plurality*), kesetaraan (*equality*), kemanusiaan (*humanity*), keadilan (*justice*) dan nilai-nilai demokrasi (*democratisation values*).

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam kehidupan. Al-Qur'an menjadi dasar ajaran-ajaran dalam menentukan benar dan salah. Secara umum beberapa prinsip dalam al Qur'an menggaungkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti; pertama, prinsip kesetaraan adalah bagaimana memandang dan memperlakukan seseorang itu sama, paham bahwasanya manusia itu memiliki kedudukan yang sama (QS. al-Hujurat: 13). Kedua, prinsip kebebasan. Manusia makhluk yang otonom dan bebas, mereka berhak menyampaikan pendapat dengan cara yang baik dan berakhlak (QS. al-Taubah; 105). Ketiga, musyawarah adalah bagaimana islam mengajarkan adanya interaksi manusia dengan orang dalam dalam menyelesaikan atau memutuskan suatu urusan untuk mencapai kesepakatan demi tujuan Bersama (QS. Ali Imran: 159). Keempat, tentang keadilan dimana menempatkan sesuatu

sesuai dengan porsi sebenarnya, adanya keseimbangan dan sesuai dengan hakikat kebenarannya (QS. al-Nisa'; 135). Kelima, persoalan keumatan yang melindungi segenap hak dan kewajiban manusia, seperti hak beragama, berpendapat, berkeluarga, dan lainnya.

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi demokrasi Terdapat elemen-elemen pokok demokrasi dalam pemahaman pemikiran Islam meliputi: As-Syura, al-Musawah, al 'Adalah, al-Hurriyyah, al-Amanah, dan al-Masuliyyah. As-Syura, persoalan cara pengambilan keputusan yang ditegaskan dalam al-Qur'an. Al-'adalah yakni keadilan. Al-Musawah persoalan kesetaraan dan egaliter. Al-Amanah tentang upaya memegang kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Al-Masuliyyah berbicara tentang bagaimana memahami tanggung jawab. Dan al-Hurriyyah adalah berarti kebebasan, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengeksperesikan pendapatnya.

Islam dan politik sudah selayaknya menjadi suatu hal yang intergral dan berjalan beriringan. Islam sebagai sebuah ajaran agama yang megatur bagaimana manusia dalam berbuat, sementara politik salah satu bentuk cara dan aktivitas manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Abdul Qadim Zallum mengatakan Negara Islam berdiri diatas landasan asas akidah Islam



(Toqiruddin:2009:74). Sejak waktu awal mula Rasulullah membentuk sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan tersebut, konsep pemerintahan telah dilaksanakan Rasulullah dengan menerapkan konsep akidah Islam. Akidah Islamiah merupakan pemikiran politik, dengan kata lain pembahasan mengenai akidah termasuk kedalam pemikiran politik bahkan akidah menjadi asas pemikiran politik bagi orang Islam.

Pendidikan politik yang didasarkan pada aspek ajaran agama dan humanisme ini mewajibkan adanya pemahaman mengenai hakikat manusia. Untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis dan humanis tersebut, maka diperlukan suatu sistem pendidikan politik yang mencakup prinsip; pertama, pendidikan harus membangun prinsip kesetaraan (*equality*). Kedua, pendidikan merupakan wahana pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*). Ketiga, fungsi pendidikan adalah tentang pengembangan potensi manusia. Keempat, kemandirian. Kelima, prinsip toleransi (*tasamuh*) dan konsesus di tengah masyarakat yang plural. Keenam, perencanaan (*planning*). Ketujuh, *rekonstruksionisme*. Kedelapan, peserta didik sebagai subjek (*paedagogic*). Kesembilan, pendidikan multikultural. Kesepuluh, prinsip global (Jalal:2001:17).

Pendidikan politik diupayakan agar mampu menjawab tantangan dan hambatan yang mengancam

terbentuknya proses sosial yang demokratis, berkualitas, dan kritis. Sejalan dengan itu, pendidikan politik harus diciptakan dengan memperhatikan orientasi yang disusun menuju pemulihan, kemajuan, peningkatan daya cipta, kecerdasan, kemampuan, kesanggupan berpikir dengan mempertimbangkan kehormatan moral dan etika sehingga akan melahirkan masyarakat yang bebas, terkendali, terbuka, masyarakat negara berbasis popularitas, imajinatif dan mampu menangani masalah kehidupan, khususnya masalah politik (Ismail:1998:98).

Dengan adanya pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengerti dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik. Dengan adanya Pendidikan politik setiap individu tidak hanya sebatas tahu tapi juga mampu memiliki kesadaran politik untuk mengemban tanggung jawab sebagai warga negara, dengan merealisasikannya dalam bentuk aktivitas, perilaku dan partisipasi langsung dalam dunia politik. Dengan Pendidikan politik, diharapkan individu mampu menilai segala sesuatu secara kritis, untuk selanjutnya menentukan sikap dan cara-cara penanganan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah lingkungan hidupnya. Dengan dimasukkannya nilai-nilai agama dalam unsur Pendidikan politik maka lebih mengarahkan manusia untuk bisa berpikir dan mengambil keputusan diatas landasan kaidah



dan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Pendidikan politik adalah upaya dalam pengembangan sportivitas individu, bagaimana seorang warga negara dapat bertingkah laku baik, jujur, solider dan toleran terhadap bangsa sendiri. Pendidikan politik mengajarkan bagaimana setiap warga negara dapat Bersikap kooperatif dan praktis, mampu bekerjasama dalam kelompok, jujur sehingga Pendidikan politik kerap diidentikan identik dengan pembentukan hati nurani politik.

Pelibatan agama dalam penguatan karakter dan etika-moral (akhlak) bangsa saat ini sangat dibutuhkan, terutama ketika melihat kondisi akhlak bangsa Indonesia yang saat ini secara umum masih sangat lemah, Maraknya kecurangan dan munculnya pertentangan di dalam kontes politik dewasa ini, sistem perpolitikan Indonesia yang didominasi oleh aktor-aktor politik yang cenderung "bablas" dan rela melakukan segala cara dalam memperoleh sebuah kekuasaan dapat berakibat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan sistem penyelenggaraan negara kedepannya. Tidak adanya "trust" antara warga negara dan para pejabat pemilik kewenangan. Munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak rakyat, serta kegaduhan politik hingga dapat berujung pada masalah disintegrasi bangsa. Maka dibutuhkan adanya pengembalian kembali konsep politik ke jalan yang benar dan beradab, ke jalan rahmatan lil alamin yang sesuai

Al-Quran dan sunnah. Perlu dilakukan Pendidikan politik secara integrative dan terstruktur dalam bentuk pelatihan, diskursus dan praktis. Pendidikan tak hanya berupa penanaman nilai politik tapi juga tentang Pendidikan moral keagamaan yang didasarkan pada substansi ajaran Islam yang murni sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan pemahaman kelslaman dan demokrasi yang lebih substantif ini masyarakat akan terhindar dari sikap yang tidak terkontrol.

KESIMPULAN

Pendidikan politik menjadi pintu mula untuk menumbuhkan partisipasi warga negara dalam kegiatan politik. Melalui Pendidikan politik diharapkan lahirnya sistem politik dan aktor politik, tak hanya berkarakter namun juga beradab. pendidikan politik menempatkan demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, yang memposisikan masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat, penentu keputusan, serta pelaksana kebijakan. paham demokrasi dan misi agama mempunyai kesamaan yang kuat, mengingat agama mempunyai kepentingan untuk menegakkan keadilan bagi kesejahteraan rakyat. Memasukan nilai nilai agama dan pemikiran Islam pada proses Pendidikan politik harus diupayakan untuk membangun kesadaran manusia secara mendasar akan kesederajatan dan bertindak sesuai dengan kebenaran Al-quran dan hadist. Pendidikan politik harus mampu



mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu-ilmu keagamaan. Materi pendidikan politik menjadi hal yang paling penting dalam melakukan Pendidikan politik. Materi Pendidikan politik haruslah bersifat mendasar dan mengutamakan penguatan pluralis, menekankan toleransi dan menjadikan manusia mampu menghormati hak-hak orang lain. Penanaman nilai-nilai agama dalam Pendidikan politik sepatutnya menjadi basic values dalam membentuk pribadi para perilaku politik untuk menjadi lebih memiliki etika, akhlak dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Fakih, Mansur, dkk. (1999). *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo. (2004). *Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Husna, Asma'ul. (2015). Pendidikan Politik Berbasis Pemikiran Islam Humaniter. *Magistra*. Vol4. No 2.
- Ismail, Faisal. (1998). *Paradigma Kebudayaan Islam Studi Kritis dan Refleksi Historis*, Yogyakarta: Tiara Illahi Press.
- Jalal, Fasli. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Aditia.
- Masamah, Ulfa & Muallim Huda. (2016). Pendidikan Islam, Pendidikan Politik, Dan Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. Vol4.No 1.
- Moh. Toqiruddin. (2005). *Relasi Agama dan Negara : Dalam Pandangan Intelektual Muslim Kontemporer*, Malang.
- Sirozi, Muhammad. (2005). *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Politik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Yaqin, M. A. (2005). *Pendidikan Multikultural. Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.